DAFTAR PUSTAKA

- Ardiani, D., & Susanto, T. (2021). Efektivitas penggunaan anggaran dalam meningkatkan kinerja sektor publik di masa pandemi. *Jurnal Akuntabilitas Keuangan Daerah*, 5(2), 112–123.
- Aurin, R. (2023). *Analisis kinerja keuangan pemerintah daerah Kota Jambi tahun anggaran 2019–2021* (Skripsi). Universitas Batanghari.
- BPKP. (2020). *Pedoman umum evaluasi kinerja keuangan pemerintah daerah*. Jakarta: Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
- Christianingrum, R. (2020). Pengaruh anggaran pendidikan terhadap pembangunan pendidikan Indonesia. *Jurnal Budget*, 3(2).
- Cutyanti, A. (2023). *Analisis kinerja keuangan pemerintah daerah Provinsi Jawa Timur tahun 2020–2022* (Skripsi). Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.
- Disdikpora DIY. (2020). *Profil Dinas Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta*. Diakses dari <https://dikpora.jogjaprov.go.id>
- Diyana, E. (2024). *Analisis rasio keuangan untuk menilai kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung periode 2018–2022* (Skripsi). GICI Business School, Depok.
- Elvira, E., et al. (2021). Dana alokasi khusus (DAK) bidang pendidikan: Model pengelolaan berdasarkan sistem desentralisasi. *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 8(2), 240–255.
- Fardila, A., Khalifah, H., Diaz Reatarie, M. D., Rosyidi, U., & Takdir, M. (2024). Strategi pengelolaan sumber daya keuangan untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan di daerah 3T: *Systematic Literature Review*. *Journal of Education (JOE)*, 7(2), 9040–9048.
- Ginting, A. M. (2022). Pengaruh belanja publik terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi DIY. *Kajian DPR RI*, 23(1).
- Gunawan, A. (2024). *Pengukuran kinerja keuangan daerah melalui rasio keuangan dan kaitannya terhadap belanja modal* (Skripsi). Universitas Negeri Yogyakarta.

- Ikatan Akuntan Indonesia. (2020). *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 1: Penyajian laporan keuangan (Revisi 2020)*. Jakarta: IAI.
- Iyana, E. (2024). *Analisis rasio keuangan untuk menilai kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung periode 2018–2022* (Skripsi). Universitas Pendidikan Indonesia.
- Kementerian Dalam Negeri. (2020). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah*.
- Kementerian Dalam Negeri. (2021). *Laporan evaluasi kinerja keuangan pemerintah daerah tahun 2020*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2019). *Peraturan Menteri Keuangan No. 225/PMK.05/2019 tentang sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah pusat*.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2021). *Laporan kinerja Kementerian Keuangan tahun 2021*. Diakses dari <https://www.kemenkeu.go.id>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2022). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah*. Diakses dari <https://www.kemenkeu.go.id/media/19740/uu-hkpd.pdf>
- Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. (2020). *Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 02 tentang laporan realisasi anggaran*. Jakarta: KSAP.
- Kurniawati, T., & Wahyuni, S. (2023). Tujuan dan fungsi laporan keuangan pemerintah daerah: Studi literatur. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Publik*, 5(2), 112–120.
- Lestari, A., & Rachmawati, I. (2021). Efektivitas dan efisiensi belanja pemerintah daerah di Indonesia: Analisis rasio dan implikasi kebijakan. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan Daerah*, 4(2), 88–97.

- Lestari, D., Hasanah, U., & Ramadhan, Y. (2021). Analisis efektivitas pengelolaan keuangan daerah. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 8(2), 25–34.
- Lestari, R. D., & Wibowo, H. (2021). Evaluasi efektivitas penyerapan anggaran pada pemerintah daerah. *Jurnal Administrasi Publik*, 18(1), 45–57.
- Musfirotun. (2024). *Analisis kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Tegal tahun 2018–2022* (Skripsi). Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
- Peraturan Gubernur DIY Nomor 73 Tahun 2024 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2019). *Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Permendagri No. 64 Tahun 2020 tentang pedoman penyusunan APBD tahun anggaran 2021.
- Prabowo, D., & Fadhilah, N. (2023). Transparansi keuangan daerah dan implikasinya terhadap pembangunan. *Jurnal Keuangan Negara*, 11(1), 33–47.
- Prabowo, R., & Afifah, N. (2021). Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran berbasis kinerja pada pemerintah daerah. *Jurnal Akuntansi dan Kebijakan Publik*, 10(1), 22–31.
- Prasetyo, A., & Lestari, R. (2022). Analisis efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah di DIY. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Publik*, 14(2), 112–121.
- Profita, A. (2023). *Pengaruh pengukuran kinerja terhadap efektivitas pelayanan publik pada pemerintah daerah Kabupaten Bantul* (Skripsi). Universitas Ahmad Dahlan.
- Putra, W., & Mahdi, I. (2023). Klasifikasi belanja daerah berdasarkan UU keuangan daerah: Kajian empiris periode 2020–2022. *Jurnal Kebijakan Fiskal Daerah*, 5(1), 45–60.

- Putra, W., Syahbandi, J., & Mahdi, I. (2023). Pengaruh belanja modal dan pendapatan asli daerah terhadap fiscal stress melalui pertumbuhan ekonomi. *JPPI*, 9(2), 733–740.
- Putri, A., & Wibowo, T. (2021). Peran pengelolaan anggaran dalam mewujudkan good governance di pemerintah daerah. *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik*, 8(2), 45–56.
- Putri, M. A., & Rahmadani, A. (2022). Evaluasi kinerja anggaran sektor pendidikan daerah pasca COVID-19. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 10(1), 89–101.
- Rahayu, S., & Firmansyah, D. (2020). Pengelolaan APBD dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Daerah*, 4(1), 55–67.
- Rahmadani, N. (2021). *Analisis kinerja anggaran berdasarkan laporan realisasi anggaran pada pemerintah Kota Padang tahun 2018–2020* (Skripsi). Universitas Negeri Padang.
- Rahmawati, D. (2022). Evaluasi efektivitas pengelolaan anggaran sektor pendidikan di pemerintah daerah. *Jurnal Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik*, 9(2), 78–91.
- Rahmawati, N. (2021). *Pengaruh pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap belanja modal pemerintah daerah* (Skripsi). Universitas Negeri Semarang.
- Rahmawati, S. (2022). Prinsip *value for money* dalam pengelolaan APBD. *Jurnal Tata Kelola Keuangan Publik*, 5(1), 14–27.
- Saleh, H. A. (2021). Dinamika otonomi daerah: Analisis UU Nomor 22 Tahun 1999 dan UU Nomor 32 Tahun 2004. *Jurnal Ilmiah Pemerintahan*, 10(3), 112–130.
- Sari, A. P. (2022). *Evaluasi efektivitas dan efisiensi anggaran pendapatan dan belanja daerah di Kabupaten Jember tahun 2019–2021* (Skripsi). Universitas Jember.
- Sari, D. N., & Nugroho, R. (2021). Evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran berbasis hasil pada pemerintah daerah. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 12(1), 45–57.

- Simamora, A. H., & Rahayu, S. (2021). Analisis kinerja anggaran berbasis indikator kinerja utama pada organisasi perangkat daerah. *Jurnal Ekonomi dan Manajemen Publik*, 7(1), 33–45.
- Simanjuntak, H., & Harahap, D. (2023). Evaluasi kinerja keuangan pemerintah Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik Daerah*, 6(1), 35–46.
- Siregar, A., & Nasution, R. A. (2020). Faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya realisasi anggaran belanja daerah. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 11(2), 88–96.
- Suryani, Y., Pertiwi, I., Mustafa, I., Mulawarman, W., & Haryaka, U. (2025). Peran pemerintah daerah dalam pengelolaan anggaran pendidikan untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan. *ALSYS*, 5(3), 376–391.
- Tobing, M. F., & Tambunan, D. (2022). Efektivitas dan efisiensi pengelolaan APBD Kota Pematang Siantar tahun anggaran 2019–2021. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 10(1), 21–30.
- Widiastuti, N., & Sutrischastini, A. (2022). Dampak belanja pemerintah daerah terhadap pertumbuhan ekonomi: Studi kasus data panel provinsi. *Jurnal Kajian Bisnis*, 30(2), 1–16.
- Widyastuti, N., & Prasetyo, B. (2022). Struktur belanja langsung dan tidak langsung dalam APBD provinsi: Studi komparatif. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Publik*, 8(2), 79–95.
- Wiryatama, H., & Khairul. (2023). Efisiensi penyerapan anggaran di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota. *JEBMA*, 3(2).
- Yuliana, R. (2022). Evaluasi laporan realisasi anggaran dan implikasinya terhadap perencanaan keuangan daerah. *Jurnal Akuntansi Publik*, 4(1), 35–44.
- Yuliani, T. (2021). Analisis pendapatan asli daerah dan transfer terhadap belanja daerah di Provinsi Lampung. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan Daerah*, 3(2), 112–123.